

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT DI PUSKESMAS KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

EVALUATION OF MEDICATION PLANNING AND PROCUREMENT AT PUSKESMAS KEDUNGBANTENG OF TEGAL REGENCY IN 2023

Fezha Azha'rah^{1*}, Fika Rizqiyana¹, Osie Listina¹, Arifina Fahamsya¹

¹ Program Studi Program Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhamada Slawi

*Korespondensi: fezhaazharah009@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan obat di puskesmas bertujuan untuk menjamin tersedianya pelayanan obat yang efektif dan efisien. Perencanaan, pengelolaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi penting dilakukan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah Puskesmas Kedungbanteng dengan Informan ditentukan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Penelitian ini mengambil data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari wawancara dan data sekunder diambil dari data keuangan, data pembelian, surat pemesanan, kartu stok, dan faktur pengiriman obat tahun 2023. Teknik analisa data penelitian menggunakan teknik kuantitatif dengan mengolah data berbentuk angka yang dibantu dengan menggunakan Microsoft Excel. Data hasil penelitian yang diperoleh dicatat dan dikelompokkan. Kemudian disajikan dalam bentuk persentase dan tabel.

Hasil penelitian diketahui, dalam indikator kesesuaian item obat dengan Formularium Nasional, hasilnya efisien sesuai nilai standar yaitu $\geq 49\%$, penyimpangan perencanaan dengan hasil 0,11%, persentase ketersediaan dana sebesar 2,2%, persentase alokasi dana pengadaan obat tidak efisien, Frekuensi pengadaan obat sedang (12x/tahun), frekuensi kesalahan faktur dengan hasil 0%, dan akurasi pembayaran oleh Puskesmas dengan hasil 0%. Pengelolaan obat dalam proses perencanaan efektif pada indikator kesesuaian item obat dengan Formularium Nasional dan indikator penyimpangan perencanaan. Dalam proses pengadaan obat belum efisien pada indikator persentase ketersediaan dan indikator persentase alokasi dana pengadaan obat tidak efisien, indikator frekuensi pengadaan obat telah efisien, dan telah efektif pada indikator frekuensi kesalahan faktur dan indikator perhitungan pembayaran.

Kata kunci: Perencanaan, Pengadaan, Efektivitas, Efisiensi, Puskesmas

ABSTRACT

Drug management in health centers aims to ensure the availability of effective and efficient drug services. Planning, management and procurement of drugs in pharmaceutical installations are important in achieving optimal health services. The purpose of this study was to assess the effectiveness and efficiency of the drug planning and procurement process at the Kedungbanteng Health Center, Tegal Regency.

The method used in this research is descriptive method. The sample in this study was Kedungbanteng Health Center with informants determined using purposive sampling technique. This study took primary data and secondary data. Primary data was taken from interviews and secondary data was taken from financial data, purchase data, order letters, stock cards, and drug delivery invoices in 2023. The research data analysis technique uses quantitative techniques by processing numerical data assisted by using Microsoft Excel. The research data obtained were recorded and grouped. Then presented in the form of percentages and tables.

The results of the study are known, in the indicator of the suitability of drug items with the National Formulary, the results are efficient according to the standard value, namely $\geq 49\%$, planning deviations with a result of 0.11%, the percentage of fund availability of funds is 2.2%, the percentage of inefficient allocation of drug procurement funds, the frequency of drug procurement is moderate (12x / year), the frequency of invoice errors with a result of 0%, and the accuracy of payment by the Puskesmas with a result of 0%. Drug management in the planning process is effective in indicators of drug item conformity with the National

Formulary and indicators of planning deviations. In the process of drug procurement, it is not efficient in the indicator of the percentage of availability and the indicator of the percentage of inefficient allocation of drug procurement funds, the indicator of the frequency of drug procurement is efficient, and it is effective in the indicator of the frequency of invoice errors and the indicator of payment calculations.

Keywords: Planning, Procurement, Effectiveness, Efficiency, Public Health Center

PENDAHULUAN

Pengelolaan obat dan pemeliharaan kesehatan di kabupaten/kota sangat penting untuk menjamin ketersediaan, pengawasan, dan keterjangkauan obat-obatan sebagai pelayanan kesehatan untuk mencegah kekosongan obat (Asi dkk, 2019). Pengelolaan obat di puskesmas tujuannya untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan pelayanan obat yang efektif dan efisien sebagai upaya untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat yang tidak sesuai sehingga mudah diperoleh pada waktu dan tempat yang tepat. Efektivitas pada perencanaan dan pengadaan adalah tolak ukur dalam tingkat pemenuhan output atau tujuan dari proses, jadi semakin tinggi pencapaian target atau tujuan dari proses maka bisa dikatakan proses tersebut semakin efektif. Efisiensi dalam perencanaan dan pengadaan adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien (Abarca, 2021).

Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi dengan menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi sebelum melakukan pengadaan. Adapun tujuan perencanaan yaitu memperoleh jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tepat sesuai dengan kebutuhan, penggunaan obat secara rasional meningkat, efisiensi penggunaan obat dapat lebih maksimal, sehingga menghindari terjadinya kelebihan stock (*stagnant*) yang bisa mengakibatkan obat mudah kadaluwarsa. Pengadaan yang efektif harus bisa menjamin jumlah, ketersediaan, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Tujuan dari pengadaan obat yaitu untuk memenuhi kebutuhan obat di setiap unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit di wilayah kerja puskesmas (Alisah, 2022).

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tingkat ketersediaan obat esensial di kabupaten/kota tahun 2020 sebesar 83,75%. Namun di Provinsi Jawa Tengah capaian persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial masih di bawah target nasional yaitu sebesar 71,43%, yang dimana hanya 71,43% kabupaten/kotanya yang tersedia dari target 85% obat esensial (KEMENKES RI, 2021). Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tingkat ketersediaan obat esensial di kabupaten/kota pada tahun 2023 di semester I sebesar 87,25%. Di Provinsi Jawa Tengah capaian persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sudah mencapai batas target nasional sebesar 95,07%, dimana obat esensial yang tersedia di kabupaten/kota lebih dari target 94% obat esensial. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam persediaan obat di Puskesmas adalah pengontrolan jumlah stok. Stok obat terlalu sedikit mengakibatkan permintaan tidak terpenuhi sehingga tingkat kepuasan pasien akan menurun. Demikian juga apabila stok terlalu besar berdampak pada biaya dan ruang penyimpanan yang tinggi sehingga kemungkinan obat akan menjadi rusak/kadaluarsa (KEMENKES RI, 2023).

Hasil pengamatan sementara oleh peneliti di puskesmas kedungbanteng pada bulan Oktober 2023, pada proses perencanaan dilihat dari sumber data pada rencana kebutuhan obat terdapat Sistem Informasi Manajemen (SIM) data *programmer* (pemegang program) yang belum valid atau tidak *update*. Saat penambahan *desk* penambahan kebutuhan obat hanya 10%. Hal ini akan menyebabkan stok obat yang digunakan sangat terbatas. Pentingnya pengelolaan perencanaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi dalam mencapai Kesehatan dan pelayanan yang optimal maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengevaluasi perencanaan dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Tegal.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam non-eksperimental (observasional) dan merupakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, proses penelitian dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data.

Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah data obat Puskesmas Kedungbanteng dengan informan ditentukan menggunakan *Teknik Purposive Sampling*. Alat yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini ialah *check list* dan panduan wawancara. Dalam proses wawancara dibantu dengan peralatan menulis dan peralatan merekam suara. Penelitian ini mengambil data secara sekunder. Data sekunder diambil dari data keuangan, data pembelian, surat pesanan, kartu stock, Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), Rencana Kebutuhan Obat (RKO), dan faktur pengiriman obat tahun 2023.

Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan mengolah data berbentuk angka yang dibantu dengan menggunakan microsoft excel. Data hasil penelitian yang diperoleh dicatat dan dikelompokkan, kemudian disajikan dalam bentuk persentase dan tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pertama dalam kegiatan seleksi dengan cara menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dalam rangka pengadaan. Adapun tujuan perencanaan yaitu memperoleh jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tepat sesuai kebutuhan, penggunaan obat secara rasional meningkat, efisiensi penggunaan obat lebih maksimal, sehingga menghindari terjadinya kelebihan stock (*stagnant*) yang bisa mengakibatkan obat kadaluwarsa (Alisah, 2022). Pada penelitian kali ini indikator yang di teliti pada proses perencanaan yaitu Indikator kesesuaian item obat berdasarkan formularium nasional tahun 2023, indikator dan indikator penyimpangan perencanaan.

Tabel I. Kesesuaian Item Obat Berdasarkan Fornas

Bulan	Persentase obat yang sesuai formularium	Standar minimal (%)
Januari	93,5%	≥49%
Februari	97,3%	≥49%
Maret	96,5%	≥49%
April	99,03%	≥49%
Mei	97,9%	≥49%
Juni	98,6%	≥49%
Juli	98,52%	≥49%
Agustus	99,22%	≥49%
September	94,8%	≥49%
Oktober	95,04%	≥49%
November	100%	≥49%
Desember	96,58%	≥49%

Berdasarkan tabel I, kesesuaian item obat dengan formularium dari bulan Januari-Desember 2023 sudah memenuhi standar minimal karena hasil persentase $\geq 49\%$ maka pengelolaan obat indikator ini sudah efektif. Hasil capaian persentase kesesuaian item obat dari bulan Januari-Desember 2023 belum sepenuhnya 100% kecuali bulan November. Untuk mencapai target dan memenuhi kebutuhan obat di puskesmas Kedungbanteng melakukan pengadaan mandiri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan item obat yang kosong atau tidak tersedia (Maspekeh dkk, 2018).

Penelitian yang telah dilakukan Dianita dkk (2017) menemukan jika Tingkat efisiensi yaitu 84,33%. Hal ini menunjukkan bahwa obat-obat an yang tidak termasuk dalam DOEN atau Fornas yaitu obat-obat yang direkomendasikan oleh puskesmas berdasarkan Tingkat kepentingan atau urgensi dan pola penyakit serta obat pelayanan kesehatan dasar tidak termasuk dalam DOEN atau Fornas. Pada penelitian Dianita dkk (2017) di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Menggunakan pedoman Formularium Nasional (Fornas) selain Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN). Oleh karena itu, tidak semua obat yang disimpan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan obat essensial. Namun, obat-obat non-essensial termasuk dalam daftar formularium nasional, yang mencakup daftar obat dalam pelayanan kesehatan dasar. Ketersediaan obat terbatas karena adanya usulan dari puskesmas berdasarkan Tingkat urgensi dan kebutuhan obat dalam pelayanan kesehatan dasar.

Tabel II. Penyimpangan Perencanaan

Jumlah perencanaan item obat (x)	Jumlah pemakaian item obat (y)	Persentase yang diperbolehkan	Penyimpangan perencanaan
160	143	10-20%	0,11%

Berdasarkan tabel II, jumlah obat dalam perencanaan sebanyak 160 obat dan jumlah pemakaian sebanyak 143 item obat dan 17 obat yang tidak digunakan selama tahun 2023 dengan penyimpangan perencanaan 0,11%. Hal ini dikarenakan tidak ada permintaan obat dari puskesmas. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Sunandar dkk (2014), yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Muna pada tahun 2014 menemukan hasil persentase penyimpangan perencanaan sebesar 9,15%. Hasil ini masih di bawah nilai standar, dan menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan perencanaan kebutuhan obat (Ismedsyah dan Rahayu, 2019).

Persentase nilai penyimpangan perencanaan berdasarkan KEMENKES RI (2019) idealnya adalah 10-20%. Nilai ini merupakan batas toleransi penyimpangan antara jumlah obat dan persediaan farmasi yang direncanakan dengan jumlah obat dan persediaan farmasi yang digunakan. Di puskesmas Kedungbanteng, penyimpangan perencanaan obat masih jauh di bawah batas standar penyimpangan, dibandingkan dengan nilai standar. Menurut hasil wawancara dengan Apoteker Puskesmas Kedungbanteng, penyimpangan ini tidak berdampak signifikan pada proses pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian, ketidaksesuaian antara rencana dan obat yang digunakan tidak mengganggu kualitas pelayanan di puskesmas. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Sunandar dkk (2014), yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Muna pada tahun 2014 menemukan hasil persentase penyimpangan perencanaan sebesar 9,15%. Hasil ini masih di bawah nilai standar, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan perencanaan kebutuhan obat Ismedsyah dan Rahayu (2019).

Pengadaan

Menurut Permenkes No 72 Tahun 2016, Pengadaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus bisa menjamin jumlah, ketersediaan, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Tujuan pengadaan obat untuk memenuhi kebutuhan obat di setiap unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit di wilayah kerja puskesmas (Permenkes, 2016).

Pengadaan obat di Puskesmas Kedungbanteng dilakukan oleh Apoteker pengelola Instalasi Farmasi Puskesmas. Jenis pengadaan ada dua meliputi pengadaan ke Dinas Kesehatan dan pengadaan mandiri. Pengadaan melalui Dinas Kesehatan yaitu pengadaan yang dilakukan setiap bulan dengan mengirimkan LPLPO melalui *E-mail*, sedangkan pengadaan mandiri yaitu pengadaan dengan pembelian melalui *e-catalogue*, apabila pembelian dengan jumlah yang tidak banyak melalui PBF/distributor. Setelah perencanaan dan anggarannya sudah diketahui, serta terdapat spesifikasi obatnya (jumlah, harga, jenis dan harga). Kemudian Dinas Kesehatan memberikan persetujuan untuk melakukan pembelian obat kepada distributor. Pengadaan obat di Puskesmas Kedungbanteng dilakukan setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Indikator yang diteliti pada proses pengadaan yaitu indikator persentase ketersediaan dana, indikator persentase alokasi dana, indikator frekuensi pengadaan obat, indikator persentase ketepatan pembayaran faktur, dan indikator frekuensi kesalahan faktur.

Tabel III. Persentase Ketersediaan Dana

Indikator	Standar *(%)	Persentase (%)
Persentase Ketersediaan Dana	≥ 100	2,2

Berdasarkan tabel III, persentase ketersediaan dana pengadaan obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng tahun 2023 yaitu dengan menghitung dana yang tersedia (x) dan kebutuhan dana sesungguhnya (y) persentase menggunakan rumus $z = \frac{x}{y} \times 100\%$ dan hasil yang diperoleh sebesar 2,2%. Hasil ini menunjukkan penggunaan dana yang diberikan masih belum diserap maksimal karena terdapat sisa anggaran pada tahun 2023. Dalam hal ini belum sesuai dengan indikator KEMENKES RI (2019) yaitu dengan nilai standar sebesar $\geq 100\%$, maka pengelolaan obat pada indikator ini belum efisien.

Persentase dana yang efisien menurut penelitian KEMENKES RI (2019) adalah $\geq 100\%$ agar dapat berjalan dengan baik untuk proses pengelolaan obat. Hal ini menunjukkan dana yang tersedia untuk Puskesmas Kedungbanteng sudah dapat memenuhi kebutuhan instalasi farmasi dalam pengadaan obat secara keseluruhan, hasil ini bisa dilihat dari lebih besarnya jumlah dana yang diberikan dibandingkan dengan dana yang digunakan. Tercukupinya dana untuk pengadaan obat sangat berpengaruh terhadap pelayanan puskesmas, dengan dana yang cukup maka puskesmas dapat melakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjamin ketersediaan obat untuk pasien. Kemudian sisa anggaran obat digunakan untuk keperluan lainnya.

Tabel IV. Persentase Alokasi Dana

Indikator	Standar anggaran pengadaan obat*(%)	Persentase (%)
Persentase Alokasi Dana	30-40	1,3

Berdasarkan tabel IV, indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dana yang diberikan kepada farmasi dibandingkan dengan seluruh anggaran puskesmas. Persentase Alokasi Dana Tahun 2023 yaitu dengan menghitung total dana pengadaan obat (x) dan total anggaran puskesmas (y) persentase menggunakan rumus $z = \frac{x}{y} \times 100\%$. Hasil persentase alokasi dana yang diperoleh sebesar 1,3%. Hal ini belum sesuai dengan nilai standar pengadaan obat KEMENKES RI (2019) yaitu 30-40%, maka pengelolaan obat pada indikator ini tidak efektif.

Hal ini belum sesuai dengan indikator KEMENKES RI (2019) yaitu nilai standar 30-40%, maka pengelolaan obat pada indikator persentase alokasi dana tidak efisien. Hal ini menunjukkan jika alokasi dana pengadaan obat untuk Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng pada tahun 2023 tidak memenuhi standar yang ditetapkan KEMENKES RI (2019) dimana alokasi dana pengadaan obat harus berkisar antara 30-40% dari total anggaran puskesmas. Tujuan dari anggaran dana untuk farmasi tinggi yaitu supaya menjamin ketersediaan sediaan farmasi seperti obat-obatan, serta kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel V. Frekuensi Pengadaan Obat

Frekuensi Pengadaan Obat		
Rendah ($<12x/tahun$)	Sedang ($12-24x/tahun$)	Tinggi ($>24x/tahun$)
0	12	0

Indikator frekuensi pengadaan tiap item obat bertujuan untuk mengetahui berapa kali obat-obatan tersebut dipesan setiap tahunnya. Pengadaan obat yang dilakukan Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng dilakukan setiap sebulan sekali. Berdasarkan tabel V, frekuensi pengadaan item obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng tahun 2023 tergolong dalam kategori sedang ($12-24x/tahun$). Oleh karena itu, indikator ini sudah sesuai dengan nilai standar, yaitu frekuensi pengadaan obat dilakukan setiap sebulan sekali atau $12x/tahun$.

Frekuensi pengadaan obat perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan obat, sehingga pasien mudah mendapatkan obat sesuai dengan indikasi. Namun meskipun dikatakan sudah memenuhi nilai standar, obat yang tersedia belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan puskesmas selama satu tahun, karena di Puskesmas Kedungbanteng pada tahun 2023 melakukan pengadaan mandiri ke PBF. Hal ini disebabkan karena kebutuhan obat meningkat dan jumlah permintaan atau obat yang diresepkan banyak.

Tabel VI. Persentase Ketepatan Pembayaran Faktur

Jumlah Faktur Pengadaan	Jumlah Hutang Faktur (x)	Jumlah faktur diayar tepat waktu (y)	Persentase (%)
13	0	13	0

Indikator frekuensi ketepatan pembayaran oleh puskesmas pada waktu yang ditentukan untuk mengetahui kualitas pembayaran puskesmas pada waktu yang telah disepakati dengan distributor. Pembayaran faktur obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng pada tahun 2023 selalu dilakukan tepat waktu karena sistem pembayaran yang disepakati dengan PBF (Pedagang Besar Farmasi) adalah 3bulan Dimana dengan syarat pembelian obat >10 juta, sehingga tidak ada tunggakan tagihan obat atau hutang faktur obat.

Berdasarkan tabel VI, pembayaran faktur obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng pada tahun 2023 selalu dilakukan tepat waktu sehingga tidak ada tunggakan tagihan obat atau hutang faktur obat. Maka pada indikator ini sudah bisa dikatakan efisien.

Penelitian Satibi (2014) menunjukkan bahwa rata-rata waktu pembayaran dari Puskesmas ke distributor yaitu 50 hari dengan rata-rata waktu pembayaran yang telah disepakati adalah 60 hari. Hal ini dikarenakan pihak distributor harus memenuhi semua pesanan obat sebelum bagian keuangan melakukan pembayaran (Maspekeh dkk, 2018).

Tabel VII. Frekuensi Kesalahan Faktur

Tahun	Jumlah Faktur yang Salah	Jumlah Faktur yang Diterima	Keterangan
2023	0	13	Barang dan Faktur Sesuai

Berdasarkan tabel VII, indikator frekuensi kesalahan faktur, yang tujuannya sebagai alat ukur untuk menghitung berapa kali terjadi kesalahan faktur di Puskesmas Kedungbanteng. Berdasarkan hasil wawancara dengan Apoteker di Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng frekuensi kesalahan faktur tidak pernah terjadi selama tahun 2023 dan jumlah faktur yang diterima selama tahun 2023 sebanyak 13 lembar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apoteker di Instalasi Farmasi Puskesmas Kedungbanteng frekuensi kesalahan faktur tidak pernah terjadi selama tahun 2023 dan jumlah faktur yang diterima selama tahun 2023 sebanyak 13 lembar. Hal ini dikarenakan pada saat penerimaan barang atau barang datang selalu dilakukan pengecekan dan diperiksa sesuai SOP (*Standart Operating Procedure*) yang berlaku seperti: nama item obat, jumlah item obat, serta harga obat. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara faktur dengan barang pesanan, maka akan segera dikembalikan ke PBF (Pedagang Besar Farmasi). Menurut KEMENKES RI (2019) nilai standar dalam indikator frekuensi kesalahan faktur sebesar 0%, sehingga pengelolaan obat pada indikator ini sudah tepat dan sudah efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan yaitu pada indikator kesesuaian item obat dengan Formularium Nasional dan Penyimpanan Perencanaan sudah efisien dan sesuai dengan nilai standar, Pada indikator persentase ketersediaan dana belum efisien, persentase alokasi dana pengadaan obat tidak ada hasil, indikator frekuensi pengadaan obat yang sedang, indikator ketepatan pembayaran oleh puskesmas sudah efektif dengan hasil 0%, dan indikator frekuensi kesalahan faktur sudah efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk pihak terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang telah memberikan surat perizinan dan Puskesmas Kedungbanteng yang telah mengizinkan untuk dilakukan penelitian mengenai perencanaan dan pengadaan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. 2021. Medical Technology abnd Public Health Journal. *Nuevos sistemas de comunicación e información*, 2013–2015.
- Alisah, T. 2022. Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Kagok Semarang. *Skripsi*. Universitas Ngudi Waluyo Semarang: Farmasi
- Asi, Sakung, J. dan Kadri, A. 2019. Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Sngurara Kelurahan Duyu Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 1(1): 245–250.
- Dianita, P.S., Kusuma, T.M. dan Septianingrum, N.M.A.N. 2017. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Magelang Berdasarkan Permenkes RI No.74 tahun 2016. *University Research Colloquium (URECOL)*. (74): 125–134. <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1631>.
- KEMENKES RI. 2019. *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEMENKES RI. 2021. *Laporan kinerja direktorat jendral kefarmasian dan alat kesehatan tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- KEMENKES RI. 2023. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Semester 1*

- Tahun 2023. Jakarta: Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Maspekeh, H., Satibi dan Widodo, G.P. 2018. Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Kebutuhan Obat Publik Serta Ketersediaan Obat di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016. *Jurnal Farmasi & Sains Indonesia*. 1(2): 14–25.
- Permenkes. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Ismedsyah dan Rahayu, S. 2019. Evaluasi Perencanaan Obat Dan Perbekalan Farmasi Di Depo. *Jurnal Surya Medika*. 4(72): 41–50.
- Satibi. 2014. Manajemen Obat di Rumah Sakit. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. 8(5): 6-7
- Sunandar, I., Agshary, A., dan Sry, S.M. 2014. Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014. *Pharmauho*. 1(2): 23–28.